

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Implementasi substansi serta prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan sedikit banyaknya telah direalisasikan dalam bentuk program-program layanan kesehatan, baik yang disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan maupun pusat layanan kesehatan dengan berbagai pertimbangan pembentukan program melalui analisis dan strategi. Namun, masalah yang timbul adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat khususnya dalam penerapan prinsip non-diskriminasi kepada ODHA yang kerap kali menimbulkan stigma negatif sehingga ODHA mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kurangnya edukasi kepada masyarakat ini diakibatkan pengetahuan yang minim tentang HIV/AIDS, baik tata cara penularannya dan profilisasi negatif. Selain itu, program BPJS Kesehatan sebagai implementasi peraturan perundang-undangan sekaligus program berbasis nasional dinilai belum mampu memberikan kemudahan dalam hal layanan kesehatan bagi masyarakat. Prosedur yang dinilai kurang efektif hingga kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat membuat pelayanan kesehatan dengan jalur BPJS Kesehatan dinilai menyusahkan dan memperlambat akses kesehatan bagi masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam ruang lingkup pemenuhan hak kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan peran pemangku kepentingan seperti LSM, pusat layanan kesehatan, hingga pemerintah dinilai sangat penting dan esensial. Kolaborasi peran di wilayah kepentingannya masing-masing dapat memberikan dampak yang positif bagi pemenuhan hak kesehatan khususnya bagi ODHA. Bentuk kolaborasi ini memiliki tujuan yang sejalan hampir di semua bentuk kerjasama antar pihak ini. Pertama, untuk menurunkan stigmatisasi dan diskriminasi yang diberikan kepada ODHA terkait dengan penyakitnya yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Penurunan stigmatisasi dan diskriminasi ini berdampak pada kesejahteraan hidup ODHA dan mampu meningkatkan penerimaan diri terhadap statusnya sebagai ODHA. Selain itu, dengan bertambahnya penerimaan diri seorang

ODHA terhadap statusnya yang positif HIV/AIDS membuat keadaan psikologis dan sosiologisnya membaik khususnya dalam hal kepercayaan diri.

Selanjutnya, kolaborasi ini membentuk suatu peran yang saling terikat dalam hal edukasi dalam hal penyejahteraan ODHA, mulai dari kesehatan hingga kepastian perlindungan hukum terkait penerapan prinsip non-diskriminasi yang terkhusus pada pemberian hak atas kesehatan dalam pelayanan kesehatan preventif dan kuratif. Program yang telah dibentuk pemerintah melalui analisis serta strategi yang baik juga memerlukan peranan pemerintahan dibawahnya, pusat layanan kesehatan, hingga LSM dalam memaksimalkan bentuk pelayanannya. Pembentukan berbagai peraturan yang dapat mengakomodasi penerapan prinsip-prinsip non-diskriminasi hingga pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan preventif dan kuratif dengan program-program yang dibentuk dengan maksud dan tujuan yang baik juga sesuai harus dapat diakomodasi dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk dapat meningkatkan peran pusat layanan kesehatan sebagai eksekutornya. LSM juga berperan penting dalam menjangkau dan merangkul ODHA untuk dapat merealisasikan program ini dengan maksimal, khususnya bagi populasi kunci yang sulit dijangkau akibat berada dalam populasi risiko rendah.

Termasuk dalam hal penyediaan logistik dan pendanaan, pemerintah tentunya tidak akan memberikan dana yang selalu dirasa cukup untuk dapat mengakomodasi setiap bentuk program layanan kesehatan. Sehingga, peran masyarakat luas termasuk LSM dapat membantu realisasi program-program tersebut melalui kegiatan diluar program pemerintah dengan maksud dan tujuan yang sama. Perlunya audit dalam hal penyediaan obat-obatan dan peralatan medis sekaligus kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan perlu diperbaiki untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik lagi kedepannya. Sehingga kekurangan jumlah personil tenaga kesehatan bukan menjadi hambatan dalam memberikan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

## 5.2 Saran

Dari kedua masalah pokok yang disebutkan sebelumnya, yaitu peningkatan mutu layanan kesehatan dan edukasi masyarakat. Maka, penulis merumuskan beberapa saran agar mendapatkan perbaikan dan/atau peningkatan mutu layanan kesehatan bagi ODHA di Kota Bandung, antara lain:

1. Membentuk peraturan tertulis beserta peraturan pelaksanaannya yang lebih spesifik, khususnya untuk mengatasi masalah diskriminasi yang bersinggungan langsung dengan penyebab menurunnya tingkat kesehatan mental. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa isu kesehatan mental menjadi masalah mendasar dengan pertimbangan bahwa stigma masyarakat terhadap ODHA masih cenderung negatif sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap ODHA dalam penerimaan layanan kesehatan. Dengan membentuk peraturan terkait dan dapat direalisasikan melalui berbagai macam program-program, pemerintah, pusat layanan kesehatan, dan LSM mendapatkan kepastian akan pelaksanaannya dan menjadi jaminan kepastian hukum yang baik untuk kebutuhan ODHA yang selama ini dinilai dalam kaca mata yang negatif di masyarakat umum.
2. Edukasi HIV/AIDS dalam jangkauan yang lebih luas, termasuk kepada masyarakat umum yang tidak hanya terfokus kepada masyarakat populasi kunci untuk dapat menurunkan stigma dan pandangan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai untuk merumuskan suatu pandangan yang keliru dalam menilai penyakit HIV/AIDS dan profilisasi negatif kepada ODHA. Perbanyak dan gencarkan edukasi dan sosialisasi terkait program-program yang berjalan untuk mendapatkan atensi masyarakat luas agar realisasi program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif.
3. Perbaiki sistem pusat layanan kesehatan dengan memberikan suplai logistik seperti pemenuhan standar kualitas dan kuantitas obat-obatan dan tenaga kesehatan dalam pusat layanan kesehatan di semua tingkat pusat layanan kesehatan dari yang paling rendah sekalipun.

4. Memperbaiki dan meningkatkan prosedur layanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan sebagai program pemerintah berskala nasional dan dikenal masyarakat luas untuk dapat memudahkan dan menjangkau tiap lini masyarakat. Misalnya, dengan menerapkan *one stop service* sehingga memudahkan pasien HIV/AIDS dalam mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membuang waktu, biaya, dan tenaga berlebih untuk menjangkau pusat layanan kesehatan di tingkat berikutnya.

Dengan demikian, implementasi peraturan perundang-undangan beserta peraturan turunannya dapat semakin baik bersamaan dengan peningkatan kinerja dan kualitas program-program yang telah ada sebelumnya ataupun program-program yang akan dibuat kedepannya agar dapat mengakomodasi kebutuhan ODHA dengan maksimal. Didukung dengan kolaborasi peran dari berbagai pihak mulai dari LSM, pusat layanan kesehatan, pemerintah, hingga lingkungan masyarakat luas dapat membawa perubahan positif akan pandangan negatif kepada ODHA yang ada di masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

### INTERNATIONAL INSTRUMENT

*General Comment No. 22. (2010). Summary record of the 49th meeting, 45th session, Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. United Nation Economic and Social Council.*

*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.*

*International Health Regulation (World Health Organization).*

*Universal Declaration of Human Rights.*

## **BUKU**

- Frishka, Sondang, *et.al.*. (2007). *Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data & Analisa : Mengungkap Kerusakan Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* (Edisi Revisi, Mei 2007). Jakarta : Solidaritas Nusa Bangsa.
- Noah, N. (2008). *Disease Surveillance (Encyclopedia of Virology – Third Edition)*.
- Office of The United Nations High Commissioner for Human Right. (2006). *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*.
- Sari, Ari Wulan dan Yenny Tju. (2015). *Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Layanan HIV-AIDS dan IMS di Layanan Kesehatan (Panduan teknis untuk petugas kesehatan tentang pembiayaan layanan HIV-AIDS dan IMS di fasilitas kesehatan bagi peserta JKN dan prosedur klaim)*: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- UNAIDS. (2020). *Evidence for Eliminating HIV-Related Stigma and Discrimination*.
- UNAIDS. *International guidelines on HIV/AIDS and Human Rights (2006 Consolidated Version)*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
- Yatim, Danny Irawan dan Ingrid Irawati Atmosukarto. (2022). *HIV dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Spiritia.

## **JURNAL**

- Azizah, Afina, *et.al.* (2022). *Upaya Peningkatan Keberfungsian Sosial Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)*. Program Studi Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
- Chan, Randolph C. H., *et.al.* (2021). *Interpersonal and Intrapersonal Manifestations of HIV Stigma and Their Impacts on Psychological Distress and Life Satisfaction Among People Living with HIV: Toward a dual-process model*.

Eka, Nurhayati, *et.al.* *Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODHA di Kota Bandung.* Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran.

Hidayat, Rif'Atul. (2016). *Perlindungan Hukum Penderita HIV/AIDS (ODHA) dalam Pelayanan Medis.* Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Setiyawan, Marwan Aris. (2022). *Hubungan Terapi Obat Antiretroviral (ARV) Terhadap Kadar Limfosit CD4+ Pada Penderita HIV di Laboratorium Prodia Sunter,* Universitas Binawan: Program Studi D-IV Teknologi Laboratorium Medis.

## **ARTIKEL**

Halodoc. 2023. *6 Faktor Utama Penularan HIV yang Jarang Disadari,* <https://www.halodoc.com/artikel/6-faktor-utama-penularan-hiv-yang-jarang-disadari>.

Kontomanolis, Emmanuel N. *et.al.* (2017). *The Social Stigma od HIV-AIDS: Society's Role.* Dove Press Journal: HIV/AIDS – Research and Palliative Care. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490433/pdf/hiv-9-111.pdf>.

*Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PMS) Triwulan I Tahun 2022.* [https://siha.kemkes.go.id/portal/files\\_upload/Laporan\\_TW\\_1\\_2022.pdf](https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf).

M. Fadhli R. *Tuberkulosis.* <https://www.halodoc.com/kesehatan/tuberkulosis>.  
*Pembatasan Layanan Pasien BPJS Kesehatan Diskriminatif.* <https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif>.

*Sejarah dan Fungsi KPA.* <https://kpakotabandung.or.id/sliders-3d-cute-slider/visi-misi/>.

Susanto, Aldona Akhira. *Upaya Pengobatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif Demam Berdarah di Kecamatan Bulukerto, Wonogiri.*

## **MEDIA MASSA**

Annur, Cindy Mutia. (2023). *Ada 27.659 Fasilitas JKN BPJS Kesehatan hingga Awal 2023, Terbanyak Puskesmas.*

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/ada-27659-fasilitas-jkn-bpjs-kesehatan-hingga-awal-2023-terbanyak-puskesmas>.

*Antiretroviral Therapy.* <https://www.paho.org/en/topics/antiretroviral-therapy>.

Bagaskara, Bima. (2023). *Kasus HIV/AIDS Kota Bandung Tertinggi di Jawa Barat.*

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7038958/kasus-hiv-aids-kota-bandung-tertinggi-di-jawa-barat#:~:text=Sedangkan%20untuk%20kasus%20HIV%20di,Kabupaten%20Bekasi%20662%2C%22%20jelasnya>.

Fajri, Dwi Latifatul. (2023) *Pengertian Diskriminasi Beserta Contohnya di Lingkungan Sosial.*

<https://katadata.co.id/berita/nasional/61cc090b8efe4/pengertian-diskriminasi-berserta-contohnya-di-lingkungan-sosial>.

*Global HIV & AIDS statistics — Fact sheet.*

<https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet#:~:text=Global%20HIV%20statistics,AIDS%2Drelated%20illnesses%20in%202022>.

*Indonesia dan Hak Asasi Manusia.*

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia).

Khairunnisa, Nuha. (2023). *Apakah Pengobatan HIV/AIDS ditanggung BPJS Kesehatan?.* <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apakah-biaya-pengobatan-hiv-aids-ditanggung-bpjs>.

Nisa. (2024). *Cara Skrining BPJS Kesehatan 2024 di webskring.bpjs-kesehatan.go.id.* <https://umsu.ac.id/health/cara-skrining-bpjs-kesehatan-2024-di-webskrining-bpjs-kesehatan-go-id/#:~:text=adalah%20suatu%20proses%20pemeriksaan%20atau,jantung%20koroner%2C%20dan%20gagal%20ginjal>.



*Penyintas HIV/AIDS Sering Mendapat Perlakuan Diskriminatif.*  
<https://ugm.ac.id/id/berita/18886-penyintas-hiv-aids-sering-mendapat-perlakukan-diskriminatif/>.

Pramesti, Jata Tri Ayu. 2023. *Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/>.

Tim Hukumonline. 2023. *Perlindungan HAM dalam Pasal 28A Sampai 28J UUD 1945.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=1>.

*What Are HIV and AIDS.* <https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-aids/what-are-hiv-and-aids/>.

*WHO remains firmly committed to the principles set out in the preamble to the Constitution.*

<https://www.who.int/about/accountability/governance/constitution>

Yayasan KNCV Indonesia. (2023). *Pentingnya Pemeriksaan Viral Load (VL) HIV.*  
<https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-viral-load-vl-hiv>.

## **LAINNYA**

*DATA-Jumlah Kasus Baru HIV Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bandung.*  
[https://opendata.bandung.go.id/api/bigdata/dinas\\_kesehatan/jumlah\\_kasus\\_baru\\_hiv\\_berdasarkan\\_kelompok\\_umur\\_di\\_kota\\_bandung?download=pdf](https://opendata.bandung.go.id/api/bigdata/dinas_kesehatan/jumlah_kasus_baru_hiv_berdasarkan_kelompok_umur_di_kota_bandung?download=pdf).

Komnas HAM dan Litbang Kompas. *Survei Pandangan Masyarakat Terhadap Hak Atas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia.*  
[https://www.komnasham.go.id/files/20211007-survei-pandangan-masyarakat-terhadap-\\$IOOX4.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211007-survei-pandangan-masyarakat-terhadap-$IOOX4.pdf).

UNAIDS. (2021). *HIV and Stigma and Discrimination (Human Rights Fact Sheet Series).*

UNAIDS. (2024). *UNAIDS calls for the protection of human rights on the International Day to End Homophobia, Biphobia, and Transphobia (IDAHOBIT).*  
<https://www.unaids.org/en/keywords/stigma-and-discrimination>.

- Y. Nita. (2019). *Kerangka Umum Standar Pelayanan Minimal*,  
<https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/assets/upload/dokumen/9e56403897502fc30122af95edb69c82.pdf>.